SAMBUTAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PENAJAM BULUMINUNG

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penajam Buluminung tahun 2020 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik tepat waktu.

Sesuai ketentuan pasal 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penajam Buluminung berkewajiban menyusun Laporan Kinerja



atas prestasi kerja yang telah dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja menyajikan target dan capaian kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penajam Buluminung tahun 2020. Target kinerja dimaksud sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala UPT. Pelabuhan Penajam Buluminung disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020.

Laporan Kinerja ini juga memuat analisis perbandingan antara rencana atau target dengan realisasi kinerja. Pencapaian realisasi kinerja keuangan juga diuraikan dalam sub bab kinerja keuangan. Mulai tahun anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Laporan Kinerja ini kami dedikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai data rujukan. Kepada semua yang sudah berkontribusi dalam laporan ini, kami mengucapkan terima kasih.

Penajam, Februari 2021 Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penajam Buluminung

> **Eko Budi Setiawan, ST** NIP. 19810318 201001 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja tahun 2020, merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penajam Buluminung (UPT. Pelabuhan) dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana dalam Renstra Dinas Perhubungan. Kinerja UPT. Pelabuhan tahun 2020 diukur berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penajam Buluminung. Perjanjian Kinerja tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2020 sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018-2023.

Perencanaan kinerja disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari UPT. Pelabuhan yaitu melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dibidang pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Penajam Buluminung. Fungsi UPT. Pelabuhan difokuskan pada upaya pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan serta pengawasan Pelabuhan Penajam Buluminung. Dari *output* pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Penajam Buluminung diharapkan dapat tercapai *outcome* yang tertib, patut, tranparansi, dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala UPT. Pelabuhan tahun 2020 terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis (SS) yang terdiri 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Skala capaian kinerja UPT. Pelabuhan pada tahun 2020 adalah **76,40%** atau kategori **BAIK**.

Adapun penjelasan singkat mengenai pencapaian kinerja UPT. Pelabuhan tahun 2020 ditinjau dari Sasaran Strategis yaitu terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan kinerja jajaran UPT. Pelabuhan, dengan rincian masing-masing capaian sebagai berikut:

- 1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan: 71%.
- 2. Jenis retribusi pelayanan yang diberlakukan pada pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan: 80%.

DAFTAR ISI

RINGK	ASAN	EKSEKUTIF	ii
DAFTA	R ISI		iii
BAB 1	PEND	AHULUAN	1
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	1
	1.3.	Organisasi dan Personalia	2
	1.4.	Sumber Keuangan	4
	1.5.	Sarana dan Prasarana	4
	1.6.	Potensi, Isu Strategis, dan Permasalahan	4
	1.7.	Sistematika Penyajian	6
BAB 2	PERE	NCANAAN KINERJA	7
	2.1.	Sasaran Strategis	7
	2.2.	Indikator dan Target Kinerja	8
	2.3.	Program dan Kegiatan	9
BAB 3	AKUI	NTABILITAS KINERJA	11
	3.1.	Capaian Kinerja Tahun 2020	11
	3.2.	Ringkasan Penjelasan Capaian Kinerja	14
	3.3.	Kinerja Keuangan	16
BAB 4	PENU	TUP	19
LAMPI	RAN		20

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu prasyarat terciptanya Pemerintahan yang baik dan terpercaya, dibutuhkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi dari program dan kegiatan.

Laporan Kinerja UPT. Pelabuhan tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada Kepala UPT. Pelabuhan atas penggunaan seluruh sumber daya yang melibatkan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2020.

Guna mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategis, dilakukan pengukuran kinerja, dimana capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan DIPA tahun 2020 beserta perubahannya, sebagai tolok ukur keberhasilan UPT. Pelabuhan tahun 2020, sehingga dapat ditemukenali sejumlah celah kinerja (*performance gap*) guna perbaikan kinerja ditahun berikutnya.

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Sebagai amanat Peraturan Bupati Kab. Penajam Paser Utara No. 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penajam Buluminung pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata, UPT. Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala UPT. yang secara teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan dan mempunyai tugas: Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dibidang pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Penajam Buluminung.

Dalam melaksanakan tugas, UPT. Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

- 1. Melaksanakan pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan serta pengawasan Pelabuhan Penajam Buluminung;
- 2. Melaksanakan pengelolaan keuangan retribusi atas pemberian jasa pelayanan Pelabuhan Penajam Buluminung;
- 3. Melaksanakan penyelesaian akhir pelayanan jasa Pelabuhan Penajam Buluminung, setelah pengguna jasa pelabuhan melunasi kewajiban membayar retribusi;
- 4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 5. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan Pelabuhan Penajam Buluminung;

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Organisasi dan Personalia

Struktur organisasi UPT. Pelabuhan terdiri dari 2 (dua) Eselon IV, dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala UPT

Tugas: memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan sebagian fungsi Dinas Perhubungan dibidang pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Penajam Buluminung.

Fungsi:

- a. membantu Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Penajam Buluminung;
- b. melakukan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan didalam lingkungan pelabuhan;
- c. mengkoordinir pelaksanaan upaya pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Penajam Buluminung;
- d. melakukan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan dan sekitarnya;
- e. mengkoordinir pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan keuangan UPT. Pelabuhan:
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas: menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT. dibidang pelayanan Pelabuhan Penajam Buluminung.

Fungsi:

- a. melaksanakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran;
- e. penyusunan rencana kegiatan pengendalian;
- f. pelaksanaan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kantor;
- h. pelaksanaan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kantor;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT. sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur pada Sub Bagian Tata Usaha, yaitu:

a. Pelaksana urusan administrasi umum dan kepegawaian;

- b. Pelaksana urusan keuangan;
- c. Pelaksana urusan penyusunan program.



Gambar 1 Struktur Organisasi UPT. Pelabuhan

Sumber: Peraturan Bupati No. 1, 2016

Sampai dengan akhir tahun 2020 UPT. Pelabuhan memiliki pegawai sebanyak 17 (tujuh belas) orang pegawai PNS dan non-PNS, yang terdiri dari 12 (dua belas) pegawai laki-laki dan sebanyak 5 (lima) pegawai perempuan, dengan perbandingan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai UPT. Pelabuhan Tahun 2020 Berdasarkan Gender

No	Unit Tugas	La	ki-Laki	Per	Perempuan		Total	
1	Kepala	1	5,88%	-	-	1	5,88%	
2	Sub Bagian Tata Usaha	-	-	-	-	-	-	
3	Pelaksana Urusan Administrasi	-	-		-	-		
	Umum dan Kepegawaian							
4	Pelaksana Urusan Keuangan	-	-	1	5,88%	1	5,88%	
5	Pelakana Urusan Penyusunan	-	-	-	-	-	•	
	Program							
6	Fungsional Umum (THL)	11	64,71%	4	23,53%	15	88,24%	
	Jumlah	12	70,59%	5	29,41%	17	100%	

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Dalam menjalankan tugasnya, UPT. Pelabuhan didukung oleh pegawai dari berbagai macam latar pendidikan, dengan komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai UPT. Pelabuhan Tahun 2020 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Tugas		Pendidikan		Jumlah	
NO	Offit Tugas	S-1	D-3	SMA/K	Gairnaii	
1	Kepala	1	-	-	1	
2	Sub Bagian Tata Usaha	-	-	-	-	
3	Pelaksana Urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	
4	Pelaksana Urusan Keuangan	-	1	-	1	

5	Pelakana Urusan Penyusunan Program	-	-	-	-
6	Fungsional Umum (THL)	2	1	12	15
Jumlah		3	2	12	17

Sumber: Hasil Analisis, 2020

1.4. Sumber Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun anggaran 2020 UPT. Pelabuhan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai rincian berikut:

Tabel 1.3 DIPA Sub Unit UPT. Pelabuhan Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	DIPA 2020 (Rp)	P-DIPA 2020 (Rp)
Belanja Langsung			
1	Belanja Pegawai	342.300.000,00	316.380.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa	109.343.000,00	156.551.726,60
	Jumlah	451.643.000,00	472.931.726,60

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

1.5. Sarana dan Prasarana

Data aset Dinas Perhubungan yang berada dalam pengelolaan UPT. Pelabuhan pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.4 Data aset Dinas Perhubungan pada UPT. Pelabuhan Tahun 2020

No	Jenis Aset	Ukuran	Kondisi	Keterangan
1	Dry Port (site	± 19 Ha	Sedang	Tanah urug, sheetpile, bronjong,
	development)			pondasi tangki.
2	Causeway	720 M2	Sedang	Berfungsi 1 unit;
			dan	1 unit tidak digunakan karena
			Rusak	mengalami efek deformasi lateral
			Berat	sheetpile.
3	Bangunan (eks. direksi	60 M2	Sedang	Dipergunakan sebagai gudang
	kit)			sementara
4	Bangunan Pos Jaga	12 M2	Baik	Bangunan baru
5	Bangunan Container	2 x 20 ft	Baik	Bangunan baru
	Office			
6	Laptop	3 Unit	Sedang	Berfungsi
7	Printer	2 Unit	Baik	Berfungsi
8	Genset	1 Unit	Baik	Berfungsi
9	Kendaraan operasional	1 Unit	Sedang	Berfungsi
	roda 4			
10	Kendaraan operasional	1 Unit	Sedang	Berfungsi
	roda 2			

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

1.6. Potensi, Isu Strategis, dan Permasalahan

UPT. Pelabuhan memegang peranan penting dalam pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan. Dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditentukan tidaklah mudah, karena potensi yang ada, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun harus

mampu menjawab permasalahan dan isu strategis dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Potensi

Pelabuhan Penajam Buluminung yang terletak di Kawasan Peruntukan Industri Buluminung, tepatnya di Kelurahan Gunung Seteleng merupakan satu diantara penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Penajam Paser Utara. Keberadaan pelabuhan sangat mendukung pengembangan dan peningkatan komoditi yang dihasilkan oleh wilayah *hinterland* agar dapat diekspor ke luar wilayah bahkan ke luar negeri, dan menjadikan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki daya saing di wilayah Propinsi Kalimantan Timur.

2. Isu Strategis

Sejalan dengan isu internasional, nasional, regional maupun lokal, serta memperhatikan permasalahan yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya dalam kurun waktu 2019-2023 (RPJMD Penajam Paser Utara 2018-2023), maka isu strategis yang berkembang pada pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Penajam Buluminung tahun 2020 ada 4 (empat), yaitu:

- a. Penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi;
- b. Optimalisasi peningkatan PAD dengan memperhatikan prinsip-prinsip perekonomian berkeadilan;
- c. Penciptaan iklim investasi melalui penyediaan infrastruktur dan regulasi;
- d. Peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka perwujudan good governance.

3. Permasalahan

UPT. Pelabuhan senantiasa berupaya untuk dapat mengakomodasi kebutuhan pengguna layanan (mitra) atas kualitas dan ketersediaan fasilitas Pelabuhan Penajam Buluminung. Permasalahan Pelabuhan Penajam Buluminung yang masih dihadapi saat ini sangat beragam sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai aspek untuk menyelesaikannya, yaitu:

- a. Belum optimalnya pencatatan laporan aktifitas bongkar muat;
- b. Belum optimalnya pengaturan lalu lintas angkutan barang di lingkungan pelabuhan;
- c. Belum tersedianya dokumen ANDALALIN Pelabuhan Penajam Buluminung;
- d. Belum optimalnya pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan untuk ruas jalan akses pelabuhan;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan tahap pengembangan penyediaan infrastruktur Pelabuhan Penajam Buluminung sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Penajam;
- f. Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan;
- g. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi kesehatan lingkungan pelabuhan;
- h. Belum optimalnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Lingkungan Kerja di pelabuhan;

- i. Belum optimalnya strategi peningkatan PAD dari retribusi pelayanan kepelabuhanan;
- j. Terbatasnya kualitas dan kuantitas kompetensi SDM pada pengelolaan kepelabuhanan.

1.7. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap capaian kinerja tersebut, sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Penyajian Laporan Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1. **BAB 1 PENDAHULUAN**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan tugas dan fungsi, organisasi, keuangan, aset, potensi, isu strategis, dan permasalahan.
- 2. **BAB 2 PERENCANAAN KINERJA**, menjelaskan rencana serta penetapan kinerja UPT. Pelabuhan tahun anggaran 2020.
- 3. **BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA**, menjelaskan pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja program dan keuangan, kendala, dan rekomendasi Kinerja UPT. Pelabuhan tahun anggaran 2020.
- 4. **BAB 4 PENUTUP**, menjelaskan kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja UPT. Pelabuhan selama tahun anggaran 2020 dan menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan serta merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023. Pada tingkat Dinas Perhubungan, diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPT. Strategi pencapainya diimplementasikan dalam Peta Strategi (*Strategy Map*) Dinas Perhubungan sebagai target kinerja pada tingkat Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan, dijabarkan lebih lanjut secara berjenjang kepada seluruh unsur organisasi sampai dengan tingkat individu.

Target Kinerja UPT. Pelabuhan Tahun 2020 tersebut, kemudian dijabarkan melalui tahapan-tahapan dan target kinerja kuartalan.

2.1. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai oleh UPT. Pelabuhan secara spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Proses mencapai sasaran diberikan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan.

Berdasarkan hal tersebut maka disusun sasaran strategis UPT. Pelabuhan dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2020. Sasaran strategis Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan kinerja jajaran UPT. Pelabuhan Penajam Buluminung

Kemudian berdasarkan sasaran strategis tersebut disusun peta strategis. Peta strategis adalah sejumlah sasaran strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat dan mengacu pada tugas dan tanggung jawab UPT. Pelabuhan.



Gambar 2 Peta Strategis UPT. Pelabuhan Tahun 2020

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

2.2. Indikator dan Target Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan perjanjian kinerja Kepala UPT. Pelabuhan ditetapkan target kinerja tahun 2020. Target kinerja ini terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja utama serta target selama tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan per Kuartal 2020. Berdasarkan hal tersebut berikut disajikan indikator kinerja dan target UPT. Pelabuhan selama tahun 2020.

Tabel 2.1 SS dan IKU UPT. Pelabuhan Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan
Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui	Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan	100 %
peningkatan kinerja jajaran UPT Pelabuhan Penajam Buluminung	Jenis retribusi yang diberlakukan pada pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan.	5

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

2. Penghitungan Capaian Kinerja

Dalam menghitung capaian realisasi kinerja dihitung dengan cara sebagai berikut:

- a. Menghitung capaian IKU
 - 1) Menghitung persentase capaian Indikator Kinerja Utama, yaitu dengan membagi capaian berbanding targetnya.

Capaian IKU =
$$\frac{Realisasi}{Target}$$

2) Menghitung persentase capaian final IKU, yaitu dengan menjumlahkan eviden dengan capaian IKU kemudian total penjumlahan dibagi 2.

Capaian Final IKU =
$$\frac{Eviden + Capaian IKU}{2}$$

b. Menghitung capaian Sasaran Strategis

Penghitungan didapatkan dengan perkalian antara capaian final IKU dan bobot final kemudian dibagikan terhadap total bobot final IKU per SS yang ada targetnya.

Capaian Sasaran =
$$\frac{Capaian \ Final \ IKU \ x \ Bobot \ Final \ IKU}{Total \ bobot \ final \ IKU \ yang \ ada \ targetnya \ perSS}$$

c. Perspektif didapat dari hasil perkalian capaian sasaran dan bobot sasaran kemudian dibagi terhadap bobot sasaran per perspektif.

$$Perspektif = \frac{Capaian Sasaran \times Bobot Sasaran}{Total \ bobot Sasaran \ per \ perspektif}$$

d. Capaian Kerja Unit dihasilkan dari perkalian capaian perspektif dengan bobot perspektif yang dibagi terhadap total bobot perspektif

Capaian Kerja Unit = $\frac{Capaian \ Perspektif \ x \ Bobot \ Perspektif}{Total \ bobot \ perspektif}$

2.3. Program dan Kegiatan

UPT. Pelabuhan melakukan koordinasi dan pengendalian pada beberapa program:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terkait dengan pelayanan administrasi perkantoran;
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terkait dengan sarana dan prasarana aparatur.

Pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab UPT. Pelabuhan tahun anggaran 2020 didukung dengan rincian anggaran dana sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rincian Pagu Anggaran UPT. Pelabuhan 2020

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	451.331.823,00
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bln	14.580.000,00
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Pkt	7.958.823,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3 Kgt	4.000.000,00
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bln 150 Lbr	57.750.000,00
	5. Penyediaan jasa keamanan, PRT, sopir, PMK, dan Satpol PP	Tersedianya jasa keamanan, PRT, sopir, PMK, dan Satpol PP	12 Bln	244.800.000,00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Pkt	600.000,00
	7. Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1 Pkt	3.000.000,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10 Bln	32.400.000,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaaan	132 Bk 10 Ktk	10.743.000,00
	10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Pkt	75.500.000,00
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana	100 %	21.600.000,00

	aparatur		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	1 Unt	20.600.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	2 Unt	1.000.000,00
	Jumlah	451.643.000,00	

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja UPT. Pelabuhan adalah kinerja keseluruhan pada tahun anggaran 2020. Pengukuran nilai/ angka capaian kinerja UPT. Pelabuhan tahun 2020 dihitung dengan membandingkan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun 2020 dengan target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja Kepala UPT. Pelabuhan.

Laporan Kinerja menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, yang ditinjau dari program dan kegiatan yang berpedoman pada penetapan target Indikator Kinerja Sasaran, termasuk keterkaitan dengan penyerapan anggaran dan *Impact* atau dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Proses penghitungan/ pengukuran kinerja menggunakan dasar dari manual IKU yang telah disusun sebelumnya. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, Permendagri No. 54 Tahun 2010 memberikan acuan skala pengukuran dalam 4 (empat) kategori, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja UPT. Pelabuhan TA. 2020

No	lo Skala Capaian Kategori Capaian	
1.	Lebih dari 100%	Sangat baik
2.	75% sampai 100%	Baik
3.	55% sampai 75%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

Sumber: Kemendagri, 2010

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020

Target kinerja UPT. Pelabuhan pada tahun anggaran (TA) 2020 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala UPT. Pelabuhan, terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis (SS) dan 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU). Target kinerja tersebut disusun dalam 2 (dua) perspektif yaitu *learning and growth perspektive* (bobot 40), dan *internal bussines process perspektive* (bobot 60).

Secara keseluruhan, capaian kinerja UPT. Pelabuhan tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja dapat dicapai dengan baik sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja UPT. Pelabuhan TA. 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
Terciptanya	Perspektif Pembelajaran & Pertumbu	han (<i>Learnin</i>	g & Growth)	28,40 %
pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan kinerja jajaran UPT Pelabuhan	Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan	100 %	71 %	71 %
Penajam	Perspektif Proses Bisnis Internal (Int	48 %		
Buluminung		5	4	80 %

	Jenis retribusi yang diberlakukan pada pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan			
Capaian Total		76,40 %		

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel diatas kemudian setelah dilakukan penghitungan sesuai bobot, maka nilai capaian kinerja total dan untuk masing-masing perspektif pada setiap kuartal TA. 2020 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3 Nilai Capaian Kinerja UPT. Pelabuhan per Perspektif TA. 2020

Perspektif	Bobot (%)	Kuartal I (%)	Kuartal II (%)	Kuartal III (%)	Kuartal IV (%)
Learning & Growth	40	-	18,8	26	28,40
Internal Bussines Process	60	24	24	36	48
		24	42,80	62	76,40

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Pengukuran nilai capaian kinerja UPT. Pelabuhan TA. 2020 dihitung dengan membandingkan realisasi capaian kinerja pada akhir kuartal dengan target (rencana kinerja) yang telah disepakati dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala UPT. Pelabuhan pada awal tahun anggaran (bulan Januari).

Capaian TA. 2020 ini tidak dapat langsung dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Jika capaian kinerja total dibandingkan langsung, maka akan bias penilaiannya. Berikut ini dijelaskan masing-masing capaian atau progres kinerja pada kuartal TA. 2020:

a. Learning and Growth Perspektive

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau *learning and growth perspektive* pada TA. 2020 mempunyai bobot 40% dari target capaian total, yang terdiri dari 1 (satu) SS dan 1 (satu) IKU yaitu:

1) Sasaran Strategis (SS)

Terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel melalui peningkatan kinerja jajaran UPT Pelabuhan Penajam Buluminung

Sasaran yang dimaksud adalah terlaksananya pengelolaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan yang profesional dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggara layanan. Untuk mewujudkan tercapaianya SS ini diperlukan perubahan manajemen pengelolaan dan sistem kinerja penyelenggara layanan kepelabuhanan.

2) <u>Indikator Kinerja Utama (IKU)</u>

Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan

Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur kualitas dan kuantitas SDM penyelenggara layanan kepelabuhan yang tersedia di UPT. Pelabuhan. Kualitas SDM yang dimaksud adalah PNS dan Non PNS yang telah dan/

atau pernah mengikuti pendidikan dan latihan yang diselenggarakan institusi pusat dan/ atau daerah.

Tabel 3.4 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama 1

IKU	Bobot (%)	Target	Realisasi	Capaian
Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan	40	100%	71%	71%
				71%

Sumber: Hasil Analisis, 2020

b. Internal Bussines Process Perspektive

Perspektif proses bisnis internal atau *internal bussines process perspektive* pada TA. 2020 mempunyai bobot 60% dari target capaian total, yang terdiri dari 1 (satu) SS dan 1 (satu) IKU yaitu:

1) Sasaran Strategis (SS)

Sasaran strategis sebagaimana disebut pada huruf a.

2) <u>Indikator Kinerja Utama (IKU)</u>

Jenis retribusi yang diberlakukan pada pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan

Tujuan indikator ini adalah untuk mengetahui capaian jenis retribusi yang diberlakukan pada pengelolaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan. Indikator ini diwujudkan dalam jumlah jenis pelayanan yang dikenakan retribusi, yaitu pas bulanan kendaraan bermotor, penumpukan barang curah kering, penumpukan barang curah basah, sewa ruangan, dan pelayanan tambahan.

Tabel 3.5 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama 2

IKU	Bobot (%)	Target	Realisasi	Capaian
Jenis retribusi yang diberlakukan pada pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan	60	5	4	80%
				80%

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Tabel 3.6 Realisasi Jenis Pelayanan Retribusi

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Cek	Realisasi (Rp)	Ket
1	Pas bulanan kendaraan bermotor	unit/bln	$\sqrt{}$	120.000,-	Terlaksana
2	Penumpukan barang curah kering	ton/hari	$\sqrt{}$	2.313.878.085,-	Terlaksana
3	Penumpukan barang curah basah	ton/hari	√	3.288.520.600,-	Terlaksana
4	Sewa ruangan	m²/bln	Χ	-	Belum terlaksana
5	Pelayanan tambahan - Biaya administrasi	nota	√	9.200.000,-	Terlaksana

Sumber: UPT. Pelabuhan, 2020

3.2. Ringkasan Penjelasan Capaian Kinerja

a. Analisa Ringkas Capaian Kinerja

Secara umum jika didasarkan pada target kinerja TA. 2020, maka capaian kinerja UPT. Pelabuhan pada tahun 2020 dapat dianggap **BAIK** karena tercapai lebih dari **75%**. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2020 ini menetapkan target untuk kegiatan atau kinerja yang dihasilkan oleh UPT. Pelabuhan yaitu Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan; dan Jenis retribusi yang diberlakukan pada pengelolaan dan pelayanan kepelabuhanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja UPT. Pelabuhan TA. 2020 ini adalah:

- 1) Penetapan kinerja yang terukur dan sesuai dengan kemampuan sumber daya;
- 2) Ketersediaan anggaran yang memadai;
- 3) Dukungan atau fasilitasi dari semua unsur, terutama dalam hal penyediaan prasarana, pengajuan produk hukum daerah, dan proses administrasi;
- 4) Meningkatnya pemahaman pejabat dan pegawai Dinas Perhubungan pada bidang tugas dan fungsi dalam mendukung kinerja UPT. Pelabuhan;
- 5) Kemampuan pegawai UPT. Pelabuhan dalam menjalankan program koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian.

Namun demikian, masih terdapat kendala yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja organisasi yaitu target kinerja yang ditetapkan tidak sebanding dengan sumber daya yang ada (terutama jumlah staf pelaksana). Sampai dengan tahun 2020, staf pelaksana masih didominasi oleh pegawai/ tenaga kontrak. Sementara itu staf PNS juga belum mencukupi (sesuai dengan kebutuhan). Staf pelaksana baru terpenuhi 5% dari kebutuhan. Untuk itu **direkomendasikan** agar unit kerja yang membidangi kepegawaian untuk melakukan pengajuan perekrutan pegawai dengan kualifikasi dan tugas jabatan urusan kepelabuhanan dan retribusi daerah.

b. Capaian Kinerja Strategis

Selain capaian kinerja yang dihasilkan sesuai dengan target dalam Renstra/ PK, UPT. Pelabuhan juga telah berhasil menghasilkan beberapa capaian strategis, diantaranya yaitu:

- Berperan aktif dalam penyusunan Draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Nantinya regulasi ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pemungutan retribusi yang tertib administrasi dan profesional;
- 2) Berperan aktif dalam penyusunan Draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- 3) Berperan aktif dalam mendorong pembentukan peraturan daerah (Perda) yang baru tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Pembentukan peraturan daerah tersebut melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2021 yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah kabupaten.

4) Fasilitasi rencana pengembangan prasarana pelabuhan sisi darat (*dryport*) melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Penajam Paser Utara.

c. Analisa Kondisi Sumber Daya Pegawai

Secara umum, pada tahun 2020 UPT. Pelabuhan masih kekurangan pegawai, terutama Kepala sub bagian tata usaha (Kasubag TU), staf pelaksana urusan administrasi umum dan kepegawaian, staf pelaksana urusan penyusunan program, staf pelaksana urusan retribusi daerah, staf pelaksana urusan pelabuhan, serta staf pelaksana urusan teknis yang memahami dasar-dasar keilmuan yang menunjang kegiatan kepelabuhanan.

Komposisi jumlah sumber daya manusia di UPT. Pelabuhan sampai dengan akhir tahun 2020, berbeda sedikit dengan kondisi pada tahun sebelumnya. Jumlah seluruh pegawai sebanyak 17 orang yang terdiri dari unsur pegawai PNS 2 orang, serta pegawai non-PNS 15 orang. Sementara itu berdasarkan jenjang jabatan eselon IV di lingkungan UPT. Pelabuhan, dari kebutuhan sebanyak 2 jabatan, hingga saat ini baru teralokasikan untuk 1 jabatan atau sekitar 50%. Untuk jabatan fungsional/ pelaksana masih kekurangan 19 pegawai (ASN/ PNS).

Adapun keragaman pegawai UPT. Pelabuhan berdasarkan jenjang jabatan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Jumlah Kondisi Pegawai UPT. Pelabuhan 2020

No	Jabatan/ Eselon	Kebutuhan	Jumlah Terpenuhi	Belum Terpenuhi	Terpenuhi (%)
1	Jabatan Pengawas	2	1	1	50
2	Staf Pelaksana/ Fungsional	21	1	20	5
3	Non PNS		15		100
Jumlah PNS		23	17	21	9

Sumber: UPT. Pelabuhan, 2020

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa UPT. Pelabuhan masih terdapat kekurangan staf pelaksana/ fungsional (PNS) sebanyak 21 orang. Sebagai antisipasi kekurangan staf pelaksana/ fungsional, telah diangkat staf kontrak/ THL/ non PNS sebanyak 15 orang dengan penugasan sebagai pengawas pelabuhan. Rincian jabatan yang belum terisi sebagai berikut:

1.	Jabatan eselon IV	:	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1 orang
2.	Pelaksana/ Fungsional	:	a. Analis Tata Usaha	1 orang
	_		b. Analis Rencana Program dan Kegiatan	1 orang
			c. Analis Manajemen Lantas	1 orang
			d. Analis Pelabuhan	1 orang
			e. Pengawas Pelabuhan	4 orang
			f. Operator Jembatan Timbang	2 orang
			g. Pemeriksa Pelabuhan	2 orang
			h. Penagih Retribusi	2 orang
			i. Pengadministrasi Karcis	1 orang
			j. Pengelola Pemeriksa Peralatan dan	2 orang
			Fasilitas Pelabuhan Sungai Danau dan	

Penyeberangan

3.3. Kinerja Keuangan

Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran UPT. Pelabuhan TA. 2020 dengan besar Pagu Anggaran Definitif sebesar Rp. 472.931.823,00. Dari sisi realisasi, UPT. Pelabuhan memiliki tingkat penyerapan anggaran sebesar 91,41% atau senilai Rp. 432.287.240,00.

Kebijakan dan isu yang ditangani UPT. Pelabuhan disaat pelaksanaan APBD II TA. 2020 sering kali tidak sama dengan saat APBD II disusun pada tahun 2019. Untuk mengatasi hal ini maka disediakan mekanisme revisi anggaran yang berfungsi untuk mengakomodasi perubahan kebijakan dan kegiatan pada APBD II TA. 2020. Hingga akhir tahun 2020, berikut realisasi anggaran pada UPT. Pelabuhan:

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran UPT. Pelabuhan TA. 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			472.931.823	432.287.240	91,41
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	451.331.823	414.139.500	91,76
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	14.580.000	9.180.000	62,96
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	7.958.823	7.884.000	99,06
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4.000.000	4.000.000	100
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	57.750.000	57.750.000	100
	5. Penyediaan jasa keamanan, PRT, sopir, PMK, dan Satpol PP	Tersedianya jasa keamanan, PRT, sopir, PMK, dan Satpol PP	244.800.000	233.300.000	95,30
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	600.000	600.000	100
	7. Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	3.000.000	2.982.500	99,42
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	32.400.000	12.300.000	37,96
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan	10.743.000	10.743.000	100

		penggandaaan			
	10. Penyediaan	Tersedianya	75.500.000	75.400.000	99,87
	komponen instalasi	komponen			
	listrik/penerangan	instalasi			
	bangunan kantor	listrik/penerangan			
		bangunan kantor			
II.	Program Peningkatan	Persentase	21.600.000	18.147.740	84,02
	Sarana dan Prasarana	peningkatan			
	Aparatur	sarana dan			
		prasarana			
	1 0 "	aparatur	00.000.000	1-11-10	22.24
	Pemeliharaan	Terlaksananya	20.600.000	17.147.740	83,24
	rutin/berkala	pemeliharaan			
	kendaraan dinas	rutin/berkala			
	operasional	kendaraan dinas			
		operasional	4 000 000	4 000 000	400
	2. Pemeliharaan	Terlaksananya	1.000.000	1.000.000	100
	rutin/berkala	pemeliharaan			
	peralatan dan	rutin/berkala			
	perlengkapan kantor	peralatan dan			
		perlengkapan			
	11DE D 1 1 1 2000	kantor			

Sumber: UPT. Pelabuhan, 2020

b. Realisasi Pendapatan

Selain realisasi anggaran tersebut diatas, juga dilakukan pengukuran terhadap capaian pendapatan dari retribusi jasa kepelabuhanan dan kepatutan pelaksanaan Perda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pencapaian pendapatan retribusi

Pencapaian pada sektor ini adalah sebesar 91,09% dari 100% target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Pendapatan UPT. Pelabuhan TA. 2020

Jenis	Jenis	Target	Realisasi	Capaian
Pendapatan	Pelayanan	(Rp)	(Rp)	(%)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Pas bulanan kendaraan bermotor Penumpukan barang curah kering Penumpukan barang curah basah Pelayanan tambahan	7.000.000.000	6.376.023.578	91,09

Sumber: UPT. Pelabuhan, 2020

2) Kepatutan administrasi retribusi

Pencapaian pada sektor ini adalah sebesar 78,60% dari 100% target yang telah ditetapkan. Perhitungan tersebut didapatkan dari hasil perhitungan realisasi capaian dan target yang telah ditetapkan, dimana dari SKRD yang

diterbitkan senilai Rp. 7.691.626.327,00 telah dilunasi senilai Rp. 6.045.426.278,00 dan retribusi terutang senilai Rp. 1.646.200.049,00.

Tabel 3.10 Administrasi Pelayanan UPT. Pelabuhan TA. 2020

Jenis	Ketetapan		Pendapatan	
Administrasi	Retribusi (Rp)	Lunas (Rp)	Terutang (Rp)	Capaian (%)
SKRD STRD/STS	7.691.626.327	6.045.426.278	1.646.200.049	78,60

Sumber: UPT. Pelabuhan, 2020

BAB 4

PENUTUP

UPT. Pelabuhan memiliki tugas utama yaitu melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dibidang pengelolaan dan pelayanan Pelabuhan Penajam Buluminung, direalisasikan dalam sasaran strategis. Pada TA. 2020 dapat disimpulkan nilai capaian kinerja UPT. Pelabuhan Penajam adalah 76,40%. Anggaran yang terealisasi sebesar ...% dan realisasi pendapatan retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar 91,09%.

Dalam rangka peningkatan atau perbaikan capaian (kualitas dan kuantitas) kinerja, telah dilakukan beberapa hal, yaitu:

- a. Penajaman proses perencanaan kerja dan target kinerja dengan memperhatikan RPJMD Penajam Paser Utara 2018-2023;
- b. Usulan penambahan jumlah pegawai, baik dari CPNS maupun rekruitmen dari instansi lain:
- c. Penataan kembali pola manajemen dalam lingkungan UPT. Pelabuhan Penajam Buluminung sehingga tugas administrasi dan keuangan pengelolaan pelabuhan terlaksanan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam struktur organisasi;
- d. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sehingga pencapaian target kinerja dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk perbaikan di masa mendatang, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mengembangkan manajemen kearsipan dan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi dan data perkantoran sehingga dapat tersimpan dengan baik, rapi dan teratur;
- b. Melaksanakan pelatihan (diklat, bimtek, workshop) untuk peningkatan keahlian dan kompetensi pegawai;
- c. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan, terutama di level pimpinan, akan perlunya penyusunan rencana kerja/ kegiatan dan kinerja yang terukur (dapat dicapai dan dihitung capaiannya);
- d. Penambahan anggaran untuk penyediaan prasarana pendukung pengelolaan layanan kepelabuhanan;
- e. Usulan penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan kualifikasi sejumlah 12 orang, dan 8 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2019.

Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan penyelenggara layanan kepelabuhan dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja UPT. Pelabuhan pada tahun berikutnya. Sehingga tujuan akhirnya adalah pendapatan asli daerah yang terus meningkat dari retribusi pelayanan kepelabuhanan.